

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi pemerintah tergolong dalam jenis lembaga pelayanan publik sebab dibangun dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi pemerintah dipercaya serta diberikan izin untuk mengelola sumber energi keuangan yang terletak di dasar lingkup negeri untuk memenuhi komitmen mereka serta melayani masyarakat. Akuntabilitas dibutuhkan sebab negara kita didominasi oleh kekayaan ekonomi yang sangat besar. Publik berhak meminta pertanggungjawaban lembaga pemerintah atas kinerja mereka (Gibor, 2021).

Organisasi pemerintah wajib mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Keputusan Presiden ini bertugas untuk menentukan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemangku kepentingan atau belum melalui penyampaian evaluasi kinerja oleh Presiden dari agen federal. Setiap instansi pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang menguraikan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya, beserta rangkuman dari semua kegiatan yang dilakukan, pengamatan yang dilakukan, dan emosi yang dirasakan, termasuk keberhasilan dan kegagalan. Organisasi pemerintah harus dapat menilai keberhasilan mereka dalam skenario ini dan menemukan ketabahan untuk mengakui kesalahan mereka.

Peningkatan akuntabilitas diperlukan untuk tata kelola yang efektif, yang memengaruhi upaya untuk memberantas korupsi. Menurut sejumlah penelitian, korupsi memperburuk ketidakadilan dan inefisiensi dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya, yang berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan akuntabilitas (Afriyanti et al, 2015).

Dengan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengedepankan pakta integritas dan zona bebas korupsi, maka siklus akuntansi sektor publik akan berakhir (Gibor, 2021). Akuntabilitas dipandang memiliki kekuatan untuk meningkatkan karakteristik tata kelola yang mencegahnya menghasilkan sistem politik yang demokratis dan layanan publik yang di bawah standar. Masyarakat akan mendukung menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab. Publik percaya diri dalam organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan berorientasi publik. Menurut penyelenggara, akuntabilitas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mengingat posisinya sebagai penyedia layanan publik, pemerintah dituntut untuk beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas publik (Fathia, 2017). Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan semuanya berdampak pada seberapa akuntabel kinerja instansi pemerintah.

Kepatuhan Regulasi merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan karena secara langsung mempengaruhi seberapa efisien lembaga pemerintah berjalan. Laporan harus diajukan secara adil dan sukarela untuk mematuhi aturan, memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat, dan memenuhi tugas keterbukaan publik (Riantiarno & Azlina, 2011). Kepatuhan Regulasi tampaknya berdampak pada seberapa akuntabel dan efektif entitas pemerintah. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa Kepatuhan Regulasi dapat berdampak pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk oleh Mubaraq (2017), Karima et al. (2021), dan Kartim et al. (2021).

Target anggaran harus dinyatakan dengan jelas untuk tata pemerintahan yang baik karena mereka mempengaruhi tugas pemerintah dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat umum. Sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara akurat dan tanpa ambiguitas dengan tujuan memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran memahami anggaran disebut

sebagai kejelasan tujuan anggaran (Hafzhan, 2021). Transparansi target anggaran dipandang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap seberapa baik instansi pemerintah menyelesaikan tugasnya. Kejelasan dalam tujuan anggaran dapat berdampak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya oleh Mulya dan Fauzihardani (2022), Wahyuni et al. (2021), dan Kaltsum dan Rohman (2013).

Untuk melindungi aset, memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen, pengendalian internal merupakan pendekatan organisasi dan kumpulan prosedur (Krismiaji, 2015). Pengendalian internal adalah istilah kolektif untuk struktur kelembagaan, praktik, dan metode yang digunakan untuk melindungi aset institusional, memverifikasi keakuratan data akuntansi, meningkatkan produktivitas, dan menjamin kepatuhan terhadap standar manajemen. Pengendalian intern dianggap memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada bagaimana lembaga pemerintah berfungsi dan bertanggung jawab. Pengendalian intern dapat mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas kinerja instansi pemerintah, menurut penelitian sebelumnya oleh Pratama et al. (2019), Kartim dkk. (2021), dan Hafzhan (2021).

Kumpulan dokumen yang menguraikan prosedur untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan dan karyawan disebut sebagai "sistem pelaporan" (Mulya dan Fauzihardani, 2022). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan, diperlukan perencanaan yang akurat, tidak memihak, dan transparan untuk pelaporan keuangan yang solid (BPKP: 2000). Agar manajemen memahami hasil dari pemenuhan target anggaran yang telah ditentukan sebelumnya, laporan umpan balik digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana atau anggaran. Sistem pelaporan tampaknya berdampak pada bagaimana instansi pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian sebelumnya oleh Pratama et al (2019) dan Kartim et al (2019) dan

Hafzhan (2021), mengungkapkan bahwa metode pelaporan dapat memengaruhi bagaimana entitas pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Istilah "sistem pelaporan" mengacu pada seperangkat dokumen yang menguraikan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif dan bawahan (Mulya dan Fauzihardani, 2022). Perencanaan yang akurat, tidak memihak, dan terbuka diperlukan untuk pelaporan keuangan yang sehat, menurut Badan Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP: 2000). Laporan umpan balik digunakan untuk menilai keberhasilan tindakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas dalam melaksanakan rencana atau anggaran sehingga manajemen dapat memahami hasil pencapaian target anggaran yang telah ditentukan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terlihat dipengaruhi oleh sistem pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi sebelumnya oleh Hafzhan (2021), Pratama et al. (2019), dan Kartim et al. (2019) mengemukakan bahwa sistem pelaporan dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (2021).

Dalam upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kementerian Perindustrian mengamanatkan agar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan berbagai landasan evaluasi hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 yang menjadi dasar hukum, menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjadi kerangka kerja undang-undang ini.

Kementerian Perindustrian kemudian merangkum seluruh landasan hukum pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Serta Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 93 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian.

Kesimpulan pertama berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satker Kementerian Perindustrian Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021, ditemukan bahwa salah satu Satker di Provinsi Lampung memiliki hasil penilaian dengan predikat “CC” dalam penilaian SAKIP tahun 2020 dan predikat “A” dalam penilaian SAKIP tahun 2021. Dari hasil predikat yang diperoleh dari Unit Satuan Kerja Kementerian Perindustrian di Provinsi Lampung yang sangat berbeda secara signifikan, menjadikan landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Satker Kementerian Perindustrian di Provinsi Lampung bermasalah karena mereka tidak dapat membedakan antara hasil dan target keluaran dan harus menambahkan indikator dan target kinerja tambahan untuk memenuhi target. Dokumen Rencana Strategis yang merupakan bagian dari alat evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga harus diperbaiki oleh Satker. Unit Kerja juga harus meningkatkan proses penyelarasan metrik kinerja karyawan dengan metrik kinerja atasannya. Sasaran strategis dan indikator kerja yang terfokus pada hasil tidak tercapai sehingga mengakibatkan anggaran kurang termanfaatkan karena kesalahan penganggaran di berbagai akun pengeluaran (SAKIP, 2020).

Kajian di sini menguatkan temuan kajian Istanto dan Widarno (2019). Peneliti menambahkan variabel independen ke studi ini yaitu variabel Kepatuhan Regulasi yang dapat membedakannya dari studi lain berdasarkan fenomena dan temuan kekhawatiran yang ada. Kepatuhan Regulasi merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan karena berdampak langsung pada seberapa baik entitas pemerintah berfungsi. Untuk mematuhi aturan dan memenuhi komitmen pemerintah pusat dan tanggung jawab pengungkapan publik, laporan harus disampaikan secara adil dan bebas (Riantiarno dan Azlina, 2011). Variabel kepatuhan regulasi diperkenalkan berdasarkan temuan penelitian lain, termasuk oleh Mubaraq (2017), Karima et al. (2021), dan Kartim et al (2021)., yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari uraian latar belakang di atas mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi (studi kasus pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti telah membatasi ruang lingkup penelitian dengan cara-cara berikut untuk memastikan bahwa hal itu tidak melampaui topik dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung
2. Subjek penelitian ini adalah pegawai Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung dengan Jabatan Fungsional yang sesuai dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Studi ini difokuskan pada bagaimana pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan sistem pelaporan mempengaruhi seberapa baik kinerja instansi pemerintah.
4. Fokus penelitian ini adalah akuntansi sektor publik yang meliputi administrasi publik, kepuasan publik, dan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Provinsi Lampung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah penelitian memiliki rumusan sebagai berikut mengingat latar belakang informasi yang diberikan di atas:

1. Apakah Kepatuhan Regulasi dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah Pengendalian Internal dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
4. Apakah Sistem Pelaporan dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk membuktikan apakah kepatuhan regulasi mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara eksperimental
2. Untuk membuktikan secara eksperimental apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Untuk menunjukkan secara eksperimental apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Untuk membuktikan secara eksperimental apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para akademisi untuk melanjutkan studi serupa, terutama di sektor publik.
2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia khususnya Satker di Provinsi Lampung sehingga penilaian selanjutnya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan membantu penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang, ruang lingkup kajian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup teori-teori, seperti teori besar, penelitian sebelumnya, kerangka kerja, dan hipotesis, yang mendukung penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi temuan penelitian, analisis data, dan wawasan tentang elemen-elemen yang mempengaruhi semua termasuk dalam bab ini.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menawarkan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tambahan serta kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**